

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum anggota DPRD kota Bandung masa bakti 2009-2014 telah dilaksanakan 4 tahun silam. Sebanyak 50 anggota dewan dari berbagai partai politik telah terpilih dan dilantik untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai anggota dewan. Lima puluh anggota dewan terbagi menjadi komisi-komisi yaitu: Komisi A yang menangani bidang pemerintahan, Komisi B yang menangani bidang perekonomian dan keuangan, Komisi C menangani bidang pembangunan, dan komisi D yang menangani kesejahteraan rakyat. Demikian pula dengan walikota Bandung terpilih, Beliau yang diamanahi rakyat untuk bertugas memimpin lembaga pemerintahan di kota Bandung ini.

Dalam beberapa dekade terakhir, permintaan untuk transparansi dan *good government* mengalami banyak perdebatan. Perdebatan mengenai bagaimana pemerintah memanfaatkan aspirasi publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien (Sopannah, 2012).

Untuk mewujudkan *good government*, perlu partisipasi publik untuk mengatur urusan-urusan publik termasuk perencanaan dan anggaran pemerintah daerah (Callahan, 2002).

Untuk mewujudkan tujuan kota Bandung, wakil rakyat dan walikota terpilih harus mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang kemudian

Okri Priyadi, 2014

Sistem Informasi Eksekutif Aspirasi Masyarakat Kota Bandung

diolah dan menghasilkan penyusunan program pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Seharusnya aspirasi masyarakat bisa disampaikan kapanpun kepada wakil rakyat, namun tidak banyak masyarakat yang mampu dan berani menyalurkannya kepada anggota dewan secara langsung atau menitipkannya di gedung anggota dewan perwakilan daerah.

Satu-satunya ajang bertemu langsung secara resmi dengan anggota dewan yaitu saat anggota dewan melakukan kegiatan reses, itupun tidak semua orang diundang untuk mengikuti acara tersebut sehingga pada pelaksanaannya reses ini tidak dapat mengungkap aspirasi masyarakat secara lengkap.

Penyerapan aspirasi rakyat melalui reses oleh anggota DPRD hanya menjadi mekanisme rutin tanpa makna. Sebab, belum ada mekanisme yang jelas bagaimana menyalurkan laporan hasil reses itu agar bisa masuk menjadi program perencanaan daerah. (www.kompas.com, 2010)

Dinamika masa reses juga menunjukkan gejala kurang produktif bagi peningkatan kinerja legislatif. Hasil reses belum terdokumentasikan secara utuh, tidak dibahas secara komperhensif melalui alat kelengkapan DPRD, dan tidak terstruktur sehingga kurang dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan program pemerintah daerah. Dengan kondisi demikian, tidak heran jika efektivitas masa reses pun dipertanyakan. Adapun perda yang dihasilkan tersebut cenderung dibuat dengan cara yang kurang melibatkan masyarakat (Huma, 2007).

Oki Priyadi, 2014

Sistem Informasi Eksekutif Aspirasi Masyarakat Kota Bandung

Anggaran penyerapan aspirasi yang cukup besar tidak diimbangi dengan tindak lanjut yang nyata. Selama ini agenda tindak lanjut penyerapan aspirasi ini tidak menjadi agenda penting dalam kegiatan DPRD. Bahkan dalam banyak kasus pembuatan perda kebanyakan diproses dengan cara yang kurang melibatkan masyarakat. Hasilnya perda tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal ini membuat rakyat merasa anggota DPRD banyak berbohong karena tidak ada aspirasi mereka yang diwujudkan melalui program-program daerah berkualitas. Rakyat merasa anggota DPRD hanya bisa menampung aspirasi, tetapi tidak tahu bagaimana memperjuangkannya. Rakyat kecewa dengan proses reses dan menganggap semua anggota DPRD tidak bekerja. Padahal, ini semua diakibatkan oleh sistem yang tidak jelas (Sulaeman, 2010).

Dibutuhkan sebuah sistem informasi yang menjembatani antara masyarakat, wakil rakyat, dan walikota yang dipilihnya sekaligus sistem yang bisa menunjang keputusan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat kota Bandung. Perancangan sistem tersebut dibuat menggunakan konsep sistem informasi eksekutif atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Executive Information System (EIS). EIS merupakan sistem berbasis komputer yang melayani kebutuhan informasi para eksekutif puncak dalam mengambil keputusan strategis. EIS banyak diterapkan dalam suatu organisasi karena dapat meningkatkan kinerja eksekutif yaitu, kemampuan lebih besar untuk mengidentifikasi tren historis,

Oki Priyadi, 2014

Sistem Informasi Eksekutif Aspirasi Masyarakat Kota Bandung

meningkatkan perencanaan eksekutif, meningkatkan pengawasan dan dukungan lebih besar untuk mengambil keputusan strategis (Turban,2005).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dibuat rumusan masalah yang harus diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana sistem dapat menyimpan aspirasi masyarakat sehingga aspirasi dapat terdokumentasikan secara utuh dan teratur agar dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan program PEMDA.
2. Bagaimana sistem memberikan implementasi dan pengembangan yang kondusif bagi komunikasi politik antara wakil rakyat dengan masyarakat.
3. Bagaimana membangun sistem Sistem Informasi Eksekutif yang tepat untuk kebutuhan pengolahan aspirasi masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

1. Pada penelitian ini, aspirasi yang akan digunakan adalah aspirasi secara acak yang diambil dari lembaga atau instansi yang menampung aspirasi masyarakat dan juga data langsung dari masyarakat yang penulis minta untuk menuliskan aspirasinya. Penulis juga mengikuti sejumlah reses anggota

Okri Priyadi, 2014

Sistem Informasi Eksekutif Aspirasi Masyarakat Kota Bandung

dewan dan membagikan lembar aspirasi untuk menampung seluruh aspirasi peserta reses.

2. Penelitian ini fokus kepada implementasi EIS untuk aspirasi masyarakat, dari mana dan bagaimana data diinput tidak menjadi fokus pada penelitian ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan sebuah sistem yang dapat menginventarisasi aspirasi masyarakat sehingga aspirasi dapat terdokumentasikan secara utuh dan teratur agar dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan program PEMDA.
2. Memberikan implementasi dan pengembangan yang kondusif bagi komunikasi politik antara wakil rakyat dengan masyarakat.
3. Membangun sistem *Sistem Informasi Eksekutif* yang tepat untuk kebutuhan analisis aspirasi masyarakat di Kota Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Membuat sebuah sistem alternatif yang efektif bagi pemerintah dalam hal pengolahan aspirasi masyarakat

Okri Priyadi, 2014

Sistem Informasi Eksekutif Aspirasi Masyarakat Kota Bandung

2. Aspirasi masyarakat tertampung dengan baik sehingga program pemerintah akan lebih tepat sasaran.
3. Membantu tugas para pengambil kebijakan dalam hal penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat.
4. Mempercepat pemerataan pembangunan fisik dan non fisik di daerah dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga Bandung.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis antara lain :

1. Studi literatur
Merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari literatur, paket modul, buku-buku, jurnal dan berbagai referensi yang dianggap mendukung.
2. Wawancara
Metode ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada nara sumber yaitu anggota dewan dan atau jajaran terkait mengenai kebutuhan sistem klasifikasi dan opinion mining aspirasi masyarakat
3. Analisis spesifikasi dan perancangan perangkat lunak
Pada tahapan ini penulis mendesain spesifikasi dan *requirement* dari aplikasi yang akan dibangun berdasarkan hasil studi literatur.

Oki Priyadi, 2014

Sistem Informasi Eksekutif Aspirasi Masyarakat Kota Bandung

4. Implementasi perangkat lunak

Pada tahapan ini penulis akan mengimplementasikan desain yang telah dibuat.

5. Pengujian dan analisis

Pada tahapan ini penulis menguji perangkat lunak yang telah dibuat, untuk mengetahui sejauh mana tingkat akurasi yang dihasilkan.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal penelitian ini terdiri dari tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memberikan penjelasan umum mengenai penelitian yang akan penulis lakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan berbagai teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian beserta langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis.

Oki Priyadi, 2014

Sistem Informasi Eksekutif Aspirasi Masyarakat Kota Bandung

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang studi kasus yang digunakan, pembangunan perangkat lunak, hasil penelitian, dan pembahasan hasil

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah dan saran untuk penelitian selanjutnya



Oki Priyadi, 2014

Sistem Informasi Eksekutif Aspirasi Masyarakat Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu